

## DAFTAR PUSTAKA

- H.A.W.Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Jimly Assidique, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II. Jakarta: Konpres.
- Moh Nazir, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soenobo Wirjosoegito. 2004. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. M. Solly Lubis. 2009. *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan* Bandung: Mandar Maju.
- Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Setiawa, Guntur (2004) *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia.
- Harsono, Hanifah. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Yogyakarta:Rhinheka Rasa.
- Otong Rosadi. 2012. *Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Woll Peter. 1986. *Constitutional Democracy*. Second Edition. Boston-Toronto: Little, Brown and Company.

Haris Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta, LIPI Press.

Hal : 40

Said Mas'ud. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah*. Malang, UMM Press. Hal 8

Zuhro Siti. 2009. *Elite Politik Lokal*. Jakarta, Obor. Hal: 123

Gaffar Karim, 2010. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*.

Jakarta, Pustaka Pelajar. Hal : 82.

Evaluasi Pemekaran Wilayah kabupaten/ Kota di Indonesia dalam Era Desentralisasi”, dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 5, No 2, 2006, p. 135.)

Widiastuti, Dilah. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah (studi di DPRD Kabupaten Sukoharjo periode 2004–2009)*. Diss. Universitas Sebelas Maret, 2008.

Badjo, Anita. "Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Kabupaten Halmahera Utara Periode 2009-2014." *jurnal politico* 2.6 (2015).

Rahman, Abdul. *Pelaksanaan hak dan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah (Study Tentang Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Watungadha, Marianus. "Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ngada Pada Tahun 2009-2014." (2015): 1-26.

Sukoco, Nanda Pratama. "Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur."

Aulia, Rahma, Fifiana Wisnaeni, and Ratna Herawati. "Kajian Yuridis Terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Diponegoro Law Review* 5.2 (2016): 16.

Totouw, Keven. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua." *Jurnal Eksekutif* 1.4 (2015).

Bilote, Donly Noferling. "Evaluasi Kinerja Dprd Provinsi Sulawesi Utara Dalam Fungsi Legislasi Pada Tahun 2011-2012." *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2013).

Yusdiansyah, Efik. "Peran Badan Legislasi Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Provinsi Jawa Barat." *Syar Hukum* 14.2 (2015): 106-116.

Puput Risky Pramita, Puput. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Diss. Fakultas Ekonomi, 2015.

Hutchcroft, Paul D. "Centralization and decentralization in administration and politics: assessing territorial dimensions of authority and power." *Governance* 14.1 (2001): 23-53.

Sugianto, Sugianto. "Pemahaman Otonomi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Terhadap Keutuhan Nkri (Study Tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Iii Cirebon)." *Ius Constitutum* 1.1 (2015).

Kartiwa, H. A. "Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance". (2006).

Tome, Abdul Hamid. "Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010." *Jurnal Hukum Unsrat* 20.3 (2012): 132-147..

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 01  
Tahun 2010.  
Buku Memori DPRD Kabupaten Pulau Morotai Periode 2009-20014